



Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU





DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.



Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus dengan pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Rencana Strategis SKPD
- Indikator Kinerja Utama
- Sistem Pengukuran Kinerja
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN: Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumbar
- Multilateral Meeting



Siklus Manajemen Pembangunan





Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

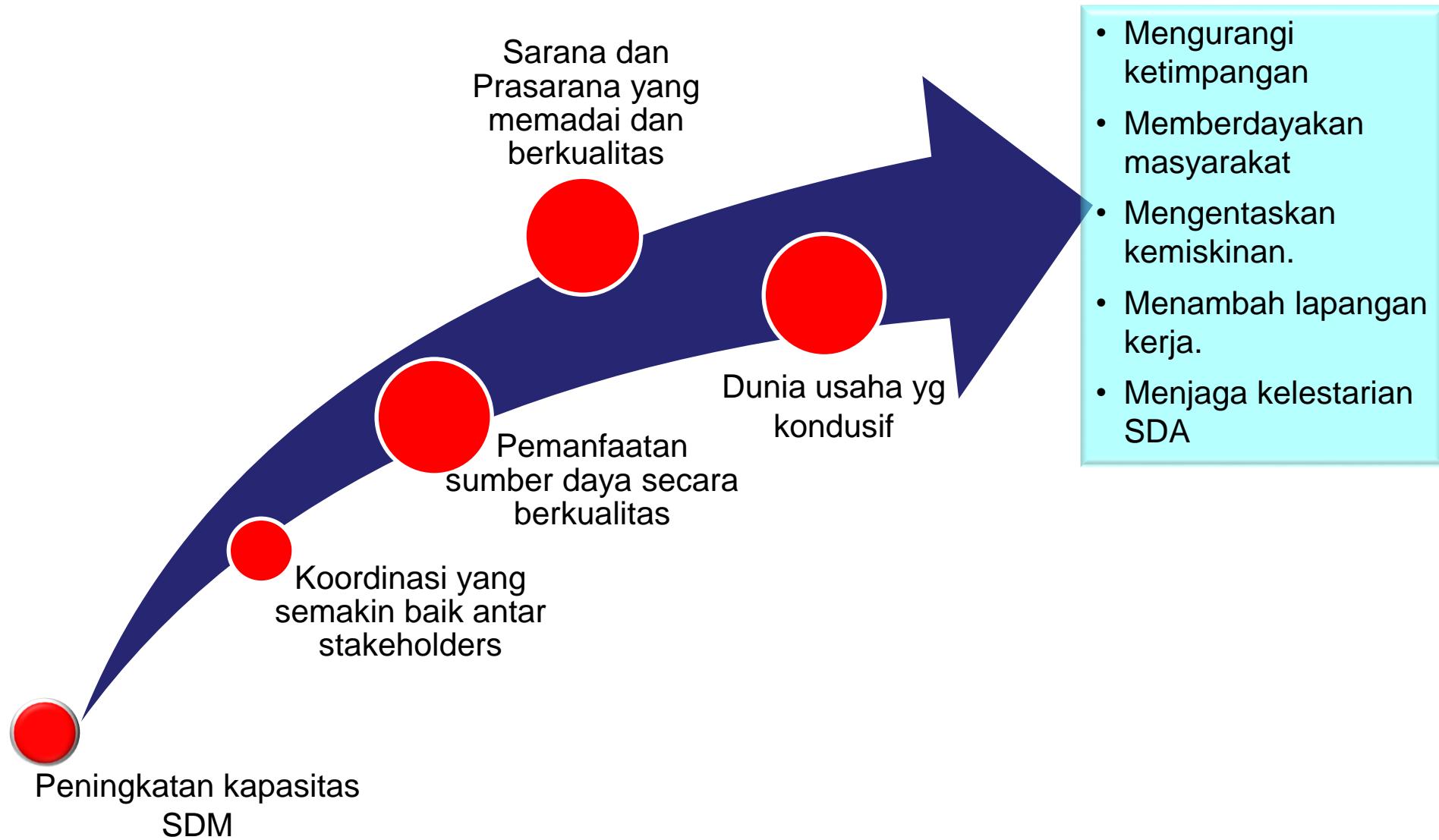
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi
Daerah

Pengelolaan
Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.

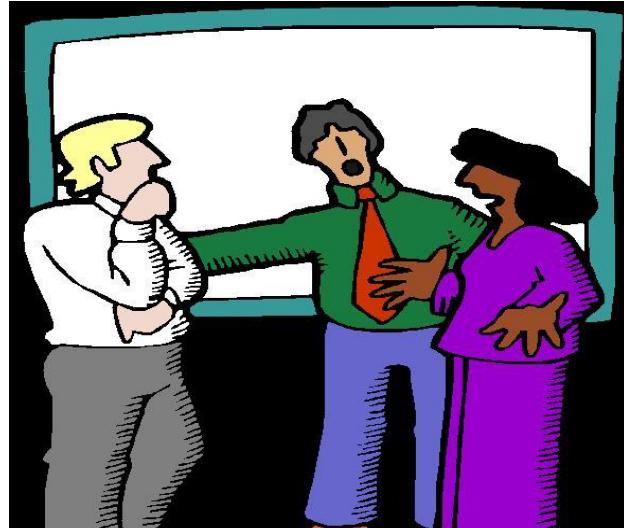
Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.

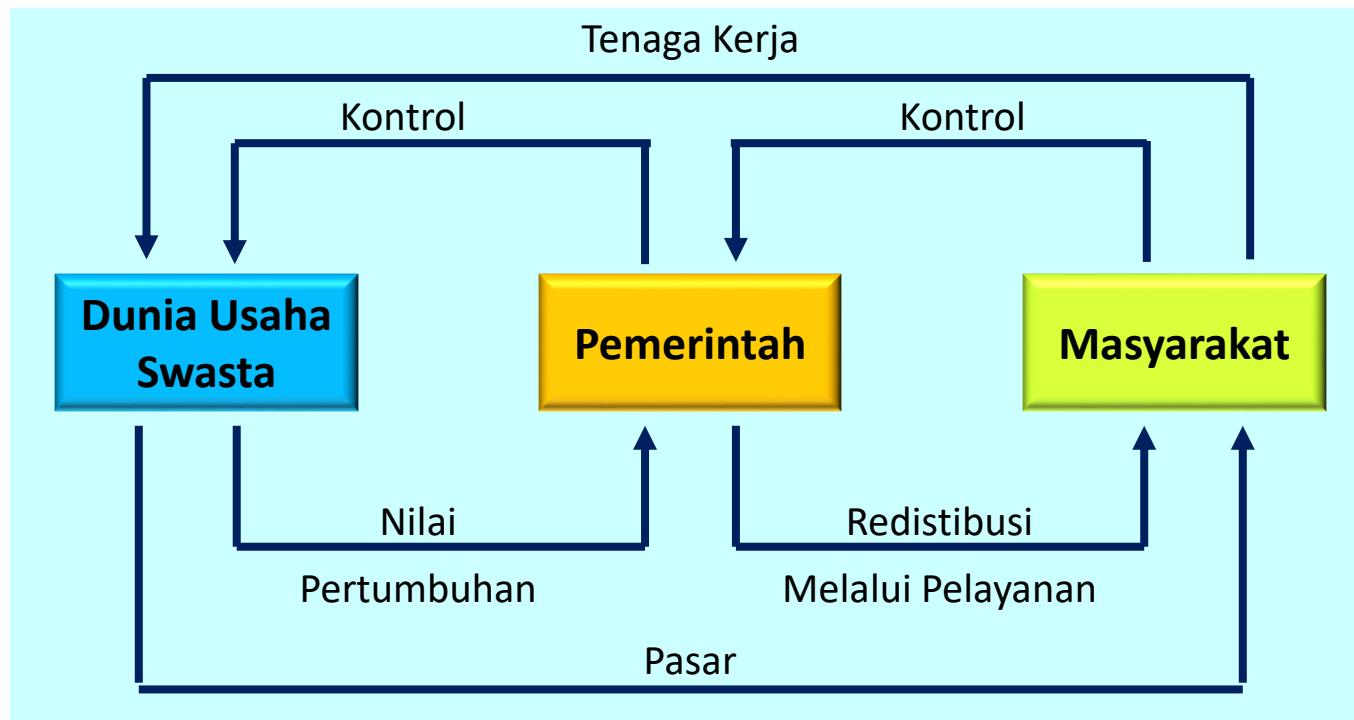
Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government	Governance
<ul style="list-style-type: none">■ Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,■ Aktor di luaranya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.	<ul style="list-style-type: none">■ Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, <i>civil society</i> dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

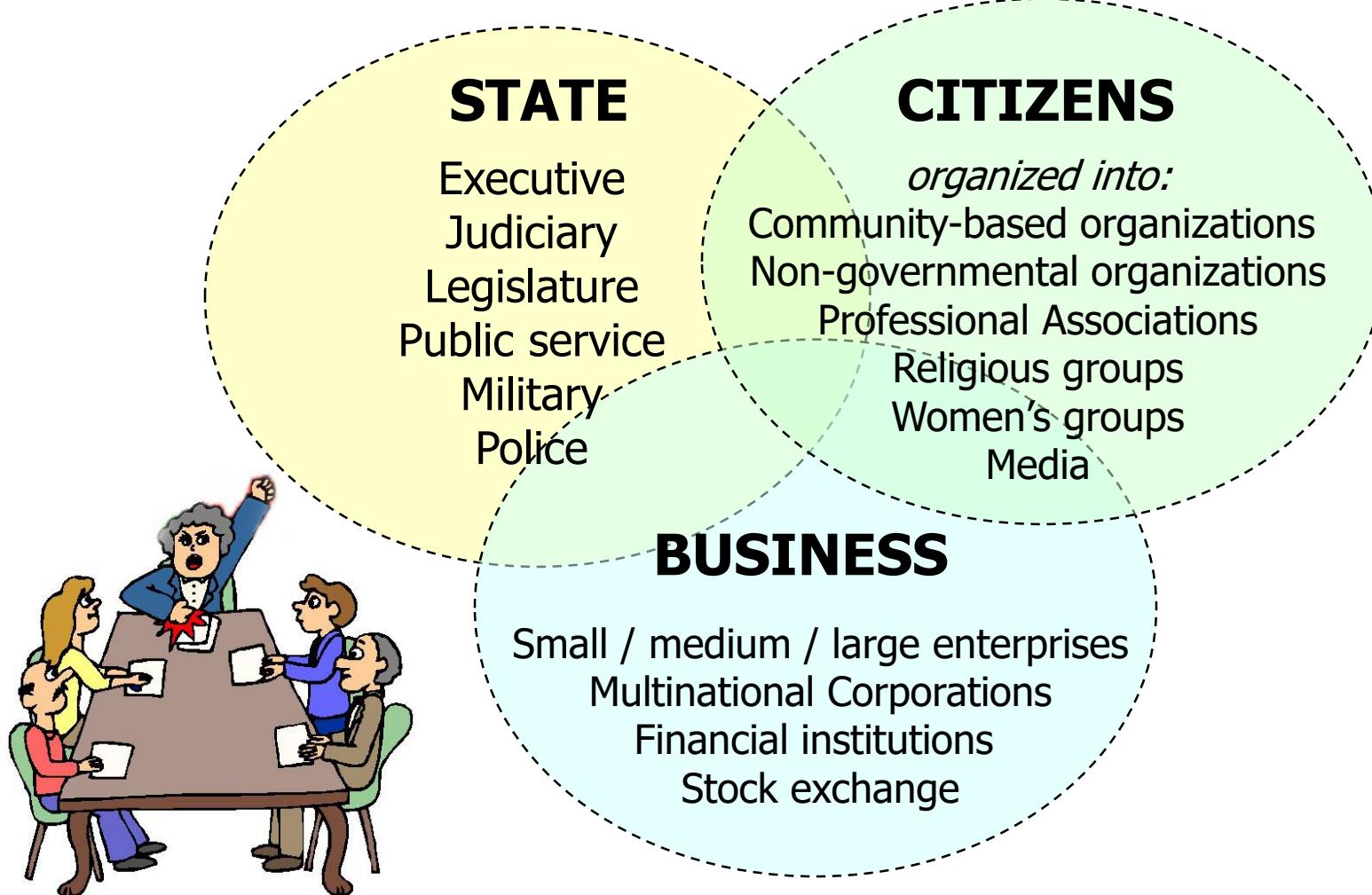
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

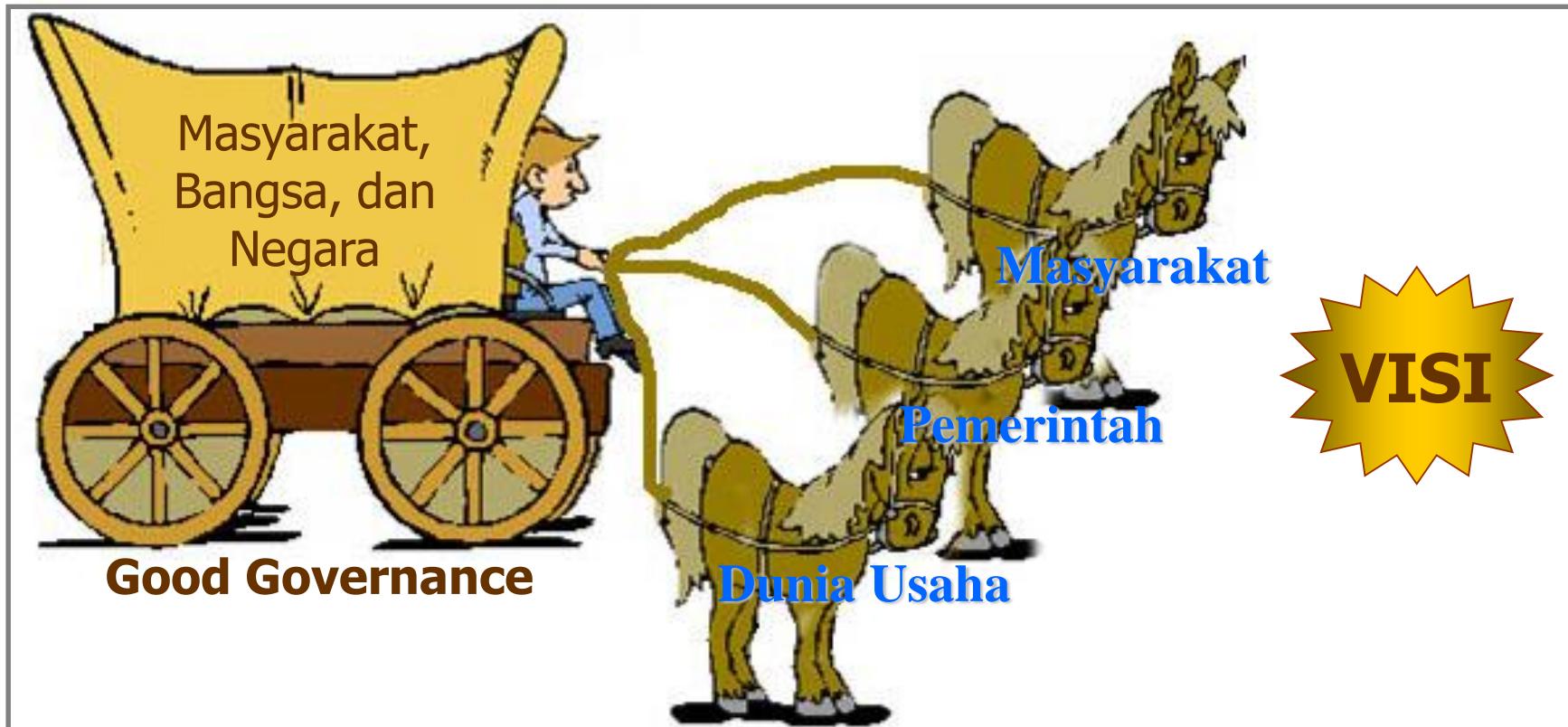
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



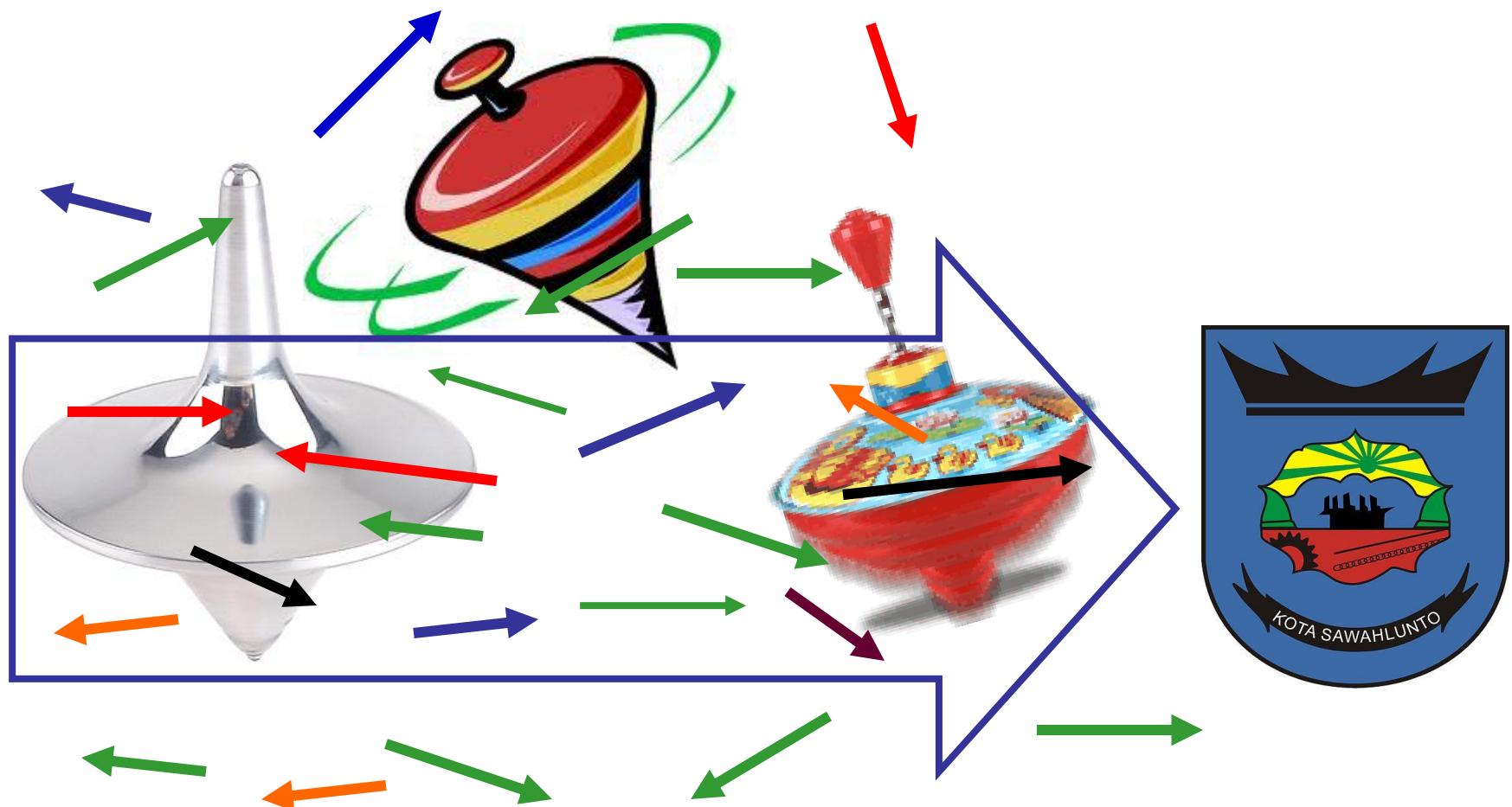
Troika



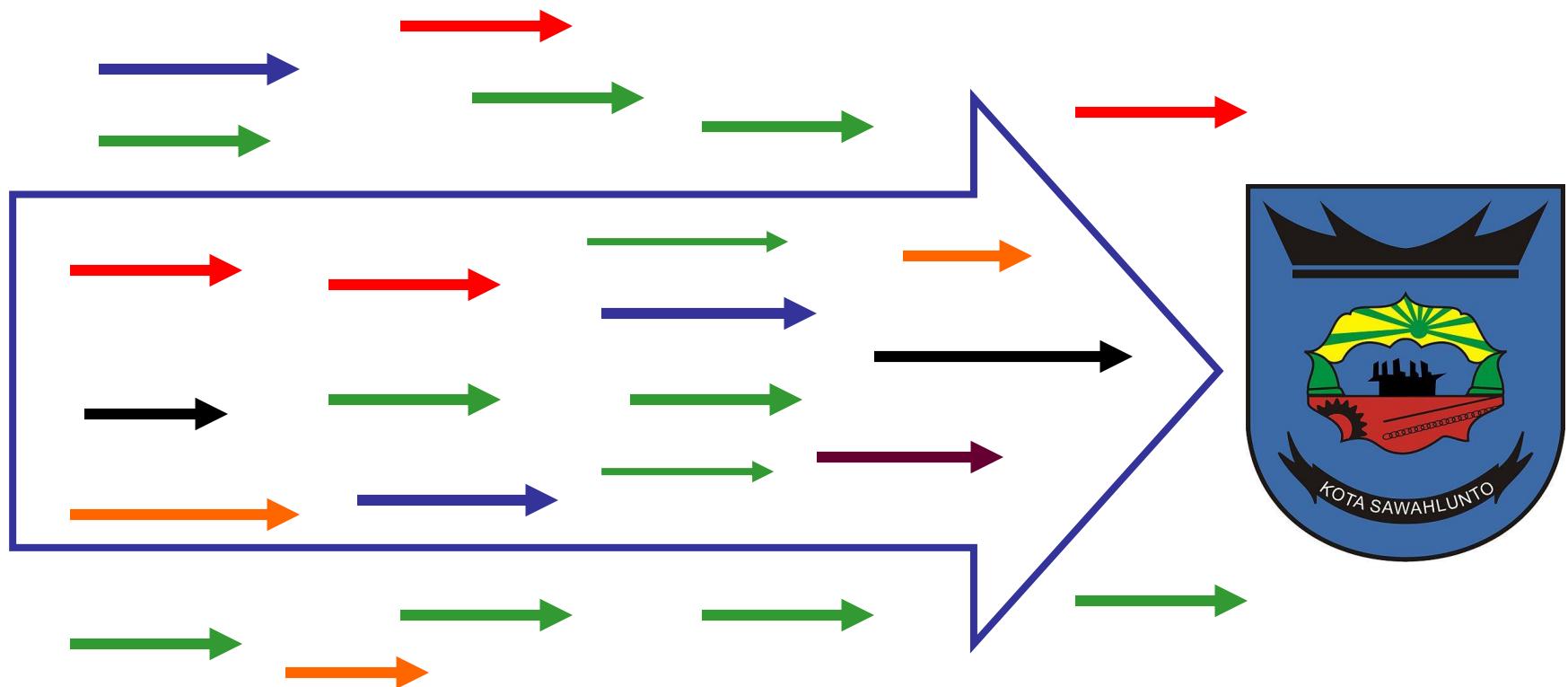
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi Stakeholders





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SAWAH LUNTO

Apa itu RPJMD

- RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepertutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:
 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Apa itu RPJMD

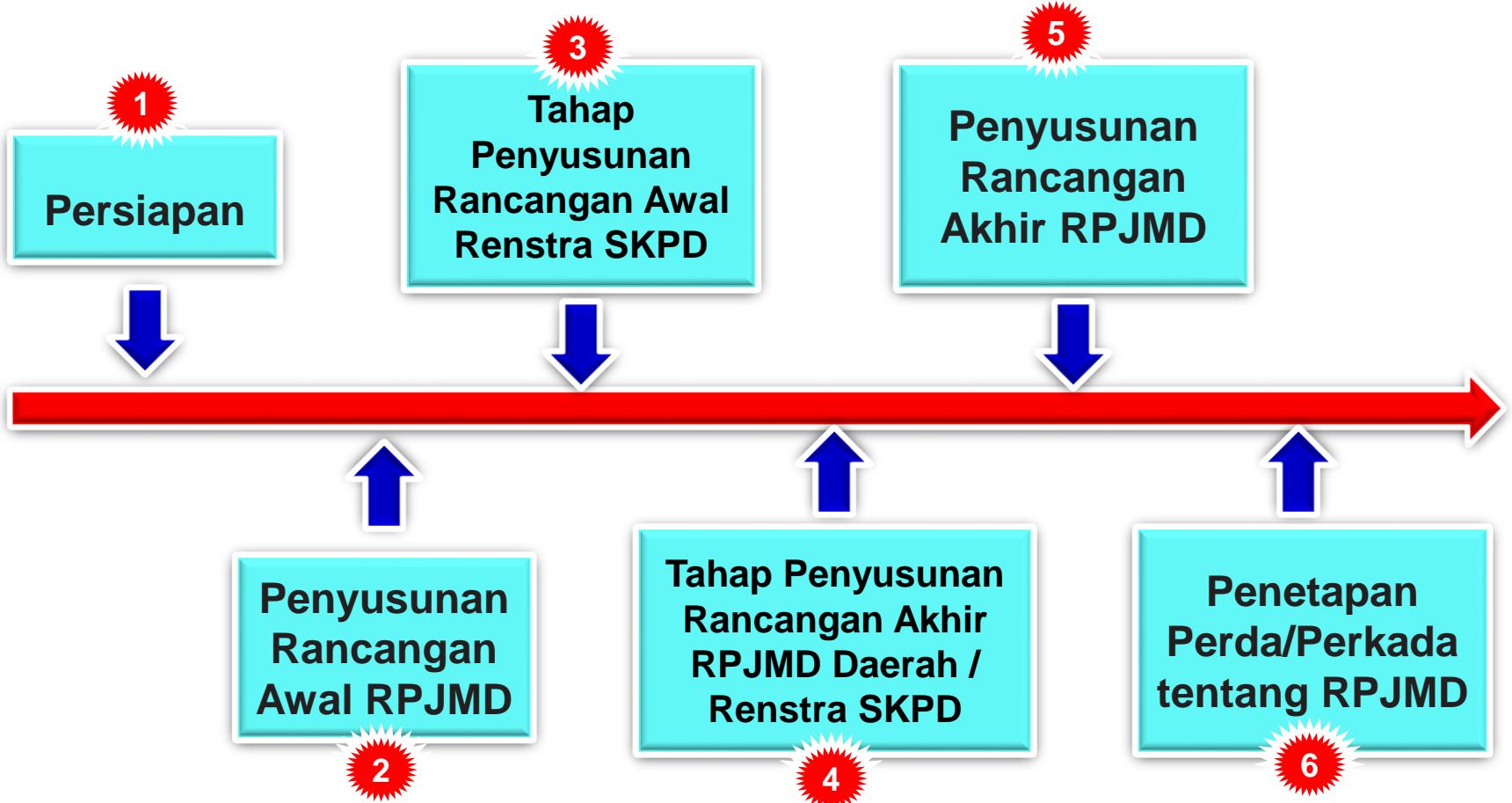
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Substansi RPJMD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Step by Step Penyusunan RPJMD



Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

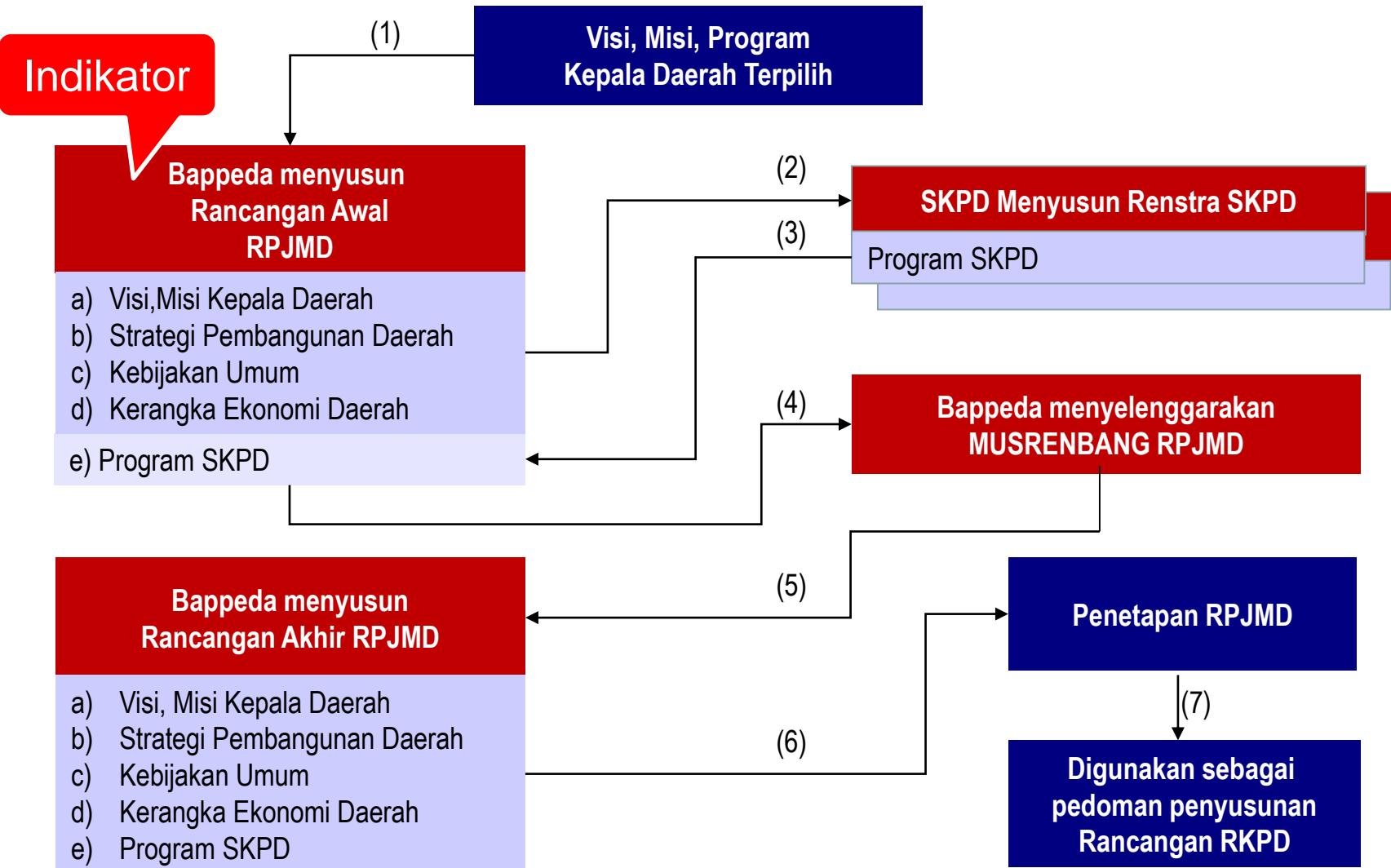
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

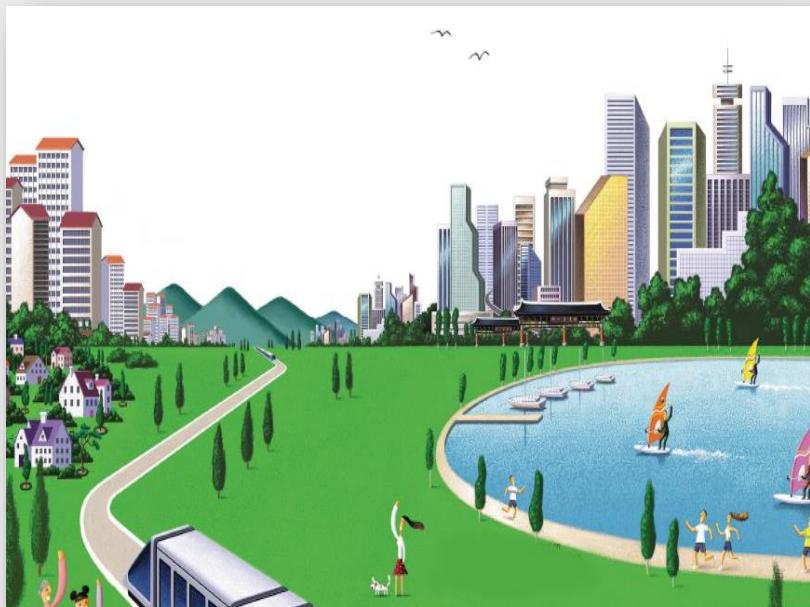
Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

Langkah Penyusunan RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

- 2.1 Kondisi Geografis Daerah
- 2.2 Pelayanan Umum
- 2.3 Ketertiban dan Ketentraman
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Lingkungan Hidup
- 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
- 2.7 Kesehatan
- 2.8 Pendidikan

- 2.9 Pariwisata dan Budaya
- 2.10 Pendidikan
- 2.11 Perlindungan sosial
- 2.12 Keuangan Daerah
- 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

- 3.1 RPJM Nasional
- 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
- 3.3 RPJM Provinsi
- 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah)
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan Daerah

Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

- 6.1 Program Pembangunan
 - 6.1.1 Program SKPD
 - 6.1.2 Program Lintas SKPD
 - 6.1.3 Program Lintas Kewilayah

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas *Non Government Stakeholders* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Contoh: Outline RPJMD DKI

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Kondisi Geografis
- Kondisi Demografi
- Sumber Kekayaan Alam
- Kondisi menurut Aspek Kehidupan
- Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB III VISI DAN MISI

- Visi
- Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

- Tujuan Pembangunan Daerah
- Strategi Pembangunan Daerah
- Pendekatan

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

- Urusan Wajib
- Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

- Umum
- Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- Arah Kebijakan Belanja Daerah
- Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Program Dedicated
- Program menurut Urusan Pemerintahan
- Program Kewilayahannya

BAB VIII PENUTUP

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-----|
| 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah | ✓ . |
| 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah | ✓ . |
| 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>) | ✓ . |

Evaluasi Kualitas RPJMD

4.	Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.	<input checked="" type="checkbox"/>

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah <u>sesuai dengan</u> rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Rumusan program pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u> kendala fiskal daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Kualitas RPJMD sudah SMART | <input checked="" type="checkbox"/> |



Rencana Strategis SKPD

Apa Itu Renstra SKPD

- Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Apa Itu Renstra SKPD

- Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
 - 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam **lima tahun** mendatang;
 - 2) Bagaimana mencapainya;
 - 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
- Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Outline Renstra SKPD

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008

Sistematika Penulisan Renstra SKPD

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
- 2.3 TUPOKSI
- 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

- 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)
- 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
- 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
- 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

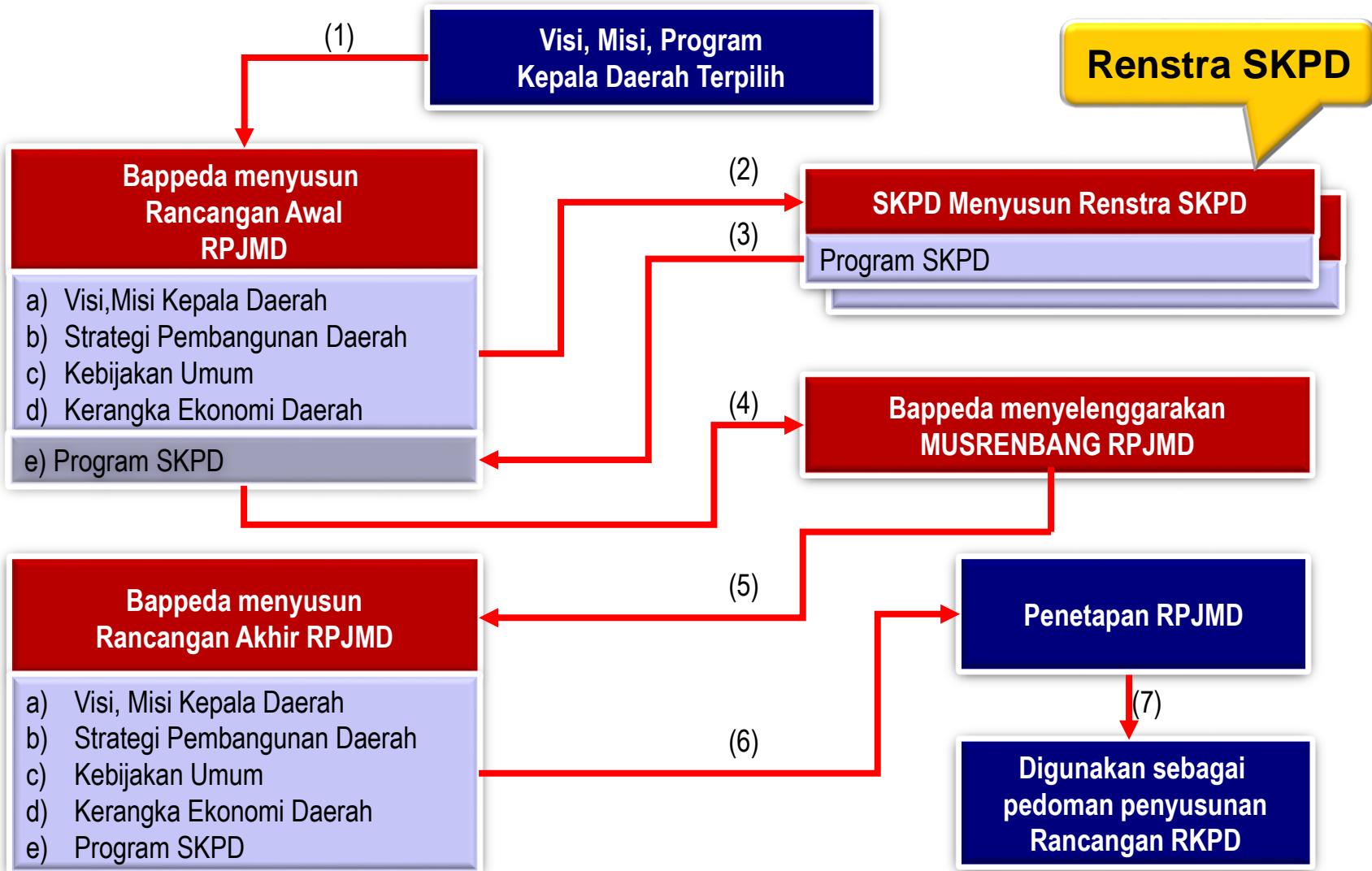
- 4.1 Visi SKPD
- 4.2 Misi SKPD
- 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)
- 4.4 Strategi
- 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAM

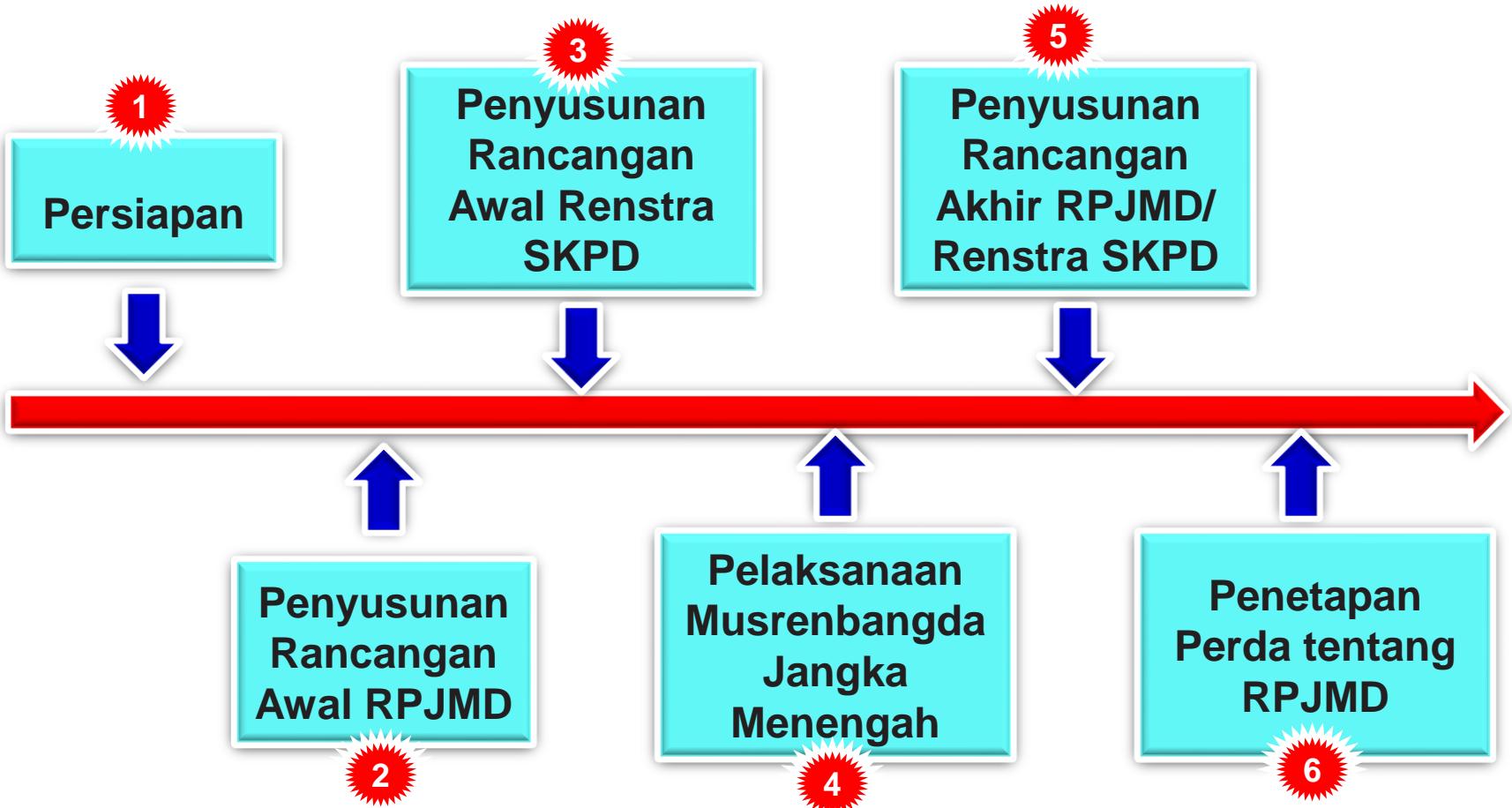
- 5.1 Program SKPD
- 5.2 Program Lintas SKPD
- 5.3 Program Lintas Kewilayahannya
- 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

BAB 6 PENUTUP

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD



Step by Step Penyusunan Renstra SKPD



Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD



4

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

- Musrenbang RPJMD
- Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD



5

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD

- Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
- Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
- Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
- Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

- Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi
- Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
- Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
- Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
- Penetapan Ranperda menjadi Perda
- Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
- Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> . |
| 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> . |
| 3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: <ul style="list-style-type: none">▪ mengantisipasi perubahan-perubahan,▪ kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,▪ merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. | <input checked="" type="checkbox"/> . |

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

- | | |
|---|-----|
| 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD. | ✓ . |
| 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD. | ✓ . |
| 9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD. | ✓ . |
| 10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. | ✓ . |
| 11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD | ✓ . |

Indikator Kinerja Utama

Tujuan Penetapan I.K.U

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Oleh karena itu:
Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing (Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007)

Penetapan I.K.U

- IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi
- **Menteri/Pimpinan Lembaga** wajib menetapkan IKU untuk K/L dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya
- **Setjen Lembaga Tinggi Negara** dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan IKU untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Lain, dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya
- **Gubernur/Bupati/Walikota** wajib menetapkan IKU untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya

Pemilihan I.K.U

- IKU pada tingkat K/L dan Pemprov/ Pemkab/ Pemkot minimal adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.
- IKU pada unit organisasi Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
- IKU pada unit organisasi Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri minimal adalah indikator keluaran (*output*).

Pertimbangan I.K.U

Pertimbangan	Karakteristik yang harus dipenuhi
<p>Prinsip pemilihan dan penetapan IKU:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kehatian-hatian,▪ Kecermatan,▪ Keterbukaan, dan▪ Transparansi.	<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen RPJMN/RPJMD, Renstra, Kebijakan Umum atau dokumen strategis lainnya yang relevanb. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnyac. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerjad. Kebutuhan data statistik pemerintahe. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan IPTEK <ul style="list-style-type: none">a. Spesifikb. Dapat dicapaic. Relevand. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukure. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Penggunaan I.K.U

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik kendala, hambatan, maupun informasi lainnya

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis dinyatakan dengan IKU

Organisasi

Tatalaksana

Peraturan
Per-UU-an

SDM
Aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas

Pelayanan
Publik

Mindset &
Cultural Set
Aparatur

Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawah Lunto

Environmental
Scanning

SWOT

Strategi
??

Mental Model

Nilai

Norma

Balanced
Score Cards

Strategy Map

Sasaran
Strategis

Logic Model

Program

Kegiatan

Analisis
Beban Kerja

Tugas dan
Fungsi

Struktur
Organisasi

Indikator
Kinerja Utama

Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline 2014	Target Kinerja 2015-2019
adang-solihin.blogspot.co.id				63

Sistem Pengukuran Kinerja



Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja?

- Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis
- dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi
- untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan pemerintah daerah disediakan dan sasaran dicapai.



Bagaimana kita bisa secara efektif mengukur suatu program pemerintah?

1. Definisikan outcome (hasil) dari program yang ingin dicapai.
2. Ukur kinerja program yang berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan.
3. Laporkan hasil kepada para pengambil keputusan yang bisa mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diberikan.



Mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja?

- Masyarakat secara terus menerus membutuhkan pemerintahan yang responsif dan cakap.
- Daerah memiliki pendapatan yang terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan sangat tinggi.
- Tanpa indikator kinerja, sulit menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja.



Moto

- Jika anda tidak mengukur hasil, anda tidak bisa membedakan antara kesuksesan dan kegagalan.
- Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak akan bisa menghargainya.
- Jika anda tidak bisa menghargai kesuksesan, anda berarti mungkin menghargai kegagalan.
- Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak bisa belajar darinya.
- Jika anda tidak mengenali kegagalan, anda tidak bisa memperbaikinya.
- Jika anda bisa menunjukkan hasil, anda bisa memperoleh dukungan publik.

Apa manfaat menggunakan sistem pengukuran kinerja?

- | | |
|--|---|
| ▪ Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya | ▪ Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan. |
| ▪ Arahan Operasional | ▪ Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan. |
| ▪ Akuntabilitas | ▪ Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. |

Apa manfaat menggunakan sistem pengukuran kinerja?

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Perencanaan | ▪ Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut |
| ▪ Pengelolaan | ▪ Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional.
▪ Memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan. |
| ▪ Penganggaran | ▪ Memperbaiki proses anggaran dengan se bisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana. |

Apa manfaat menggunakan sistem pengukuran kinerja?

- **Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
 - Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan
- **Pengawasan Kerja**
 - Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Siapa yang menyusun indikator kinerja?

- Indikator kinerja disusun oleh para pegawai/staf dengan:
 - Mengumpulkan ide/masukan dari mereka yang terlibat dalam penyusunan indikator
 - ide/masukan tersebut bisa menjadi alat kontrol
 - Memberdayakan dan memotivasi pegawai untuk maju dan meraih target
 - Usaha dari setiap pegawai dapat membawa perbedaan yang terukur.

Bagaimana tolok ukur kinerja digunakan dalam penyusunan anggaran kinerja?

- Tolok ukur kinerja adalah bagian penting dari penganggaran kinerja. Tolok ukur kinerja merupakan:
 - Bagian dari rencana strategis dan TUPOKSI setiap dinas; tolok ukur menunjukkan bagaimana kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas akan diukur.
 - Digunakan oleh para pengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya dan menetapkan jumlah anggaran.
 - Dimaksudkan untuk membantu usaha-usaha dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran prioritas.
 - Alat monitor untuk membantu pemerintah daerah dan menjadikan pemerintah daerah bertanggungjawab kepada masyarakatnya.

Apakah ada sebagain tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih mudah diukur dibandingkan yang lainnya?

- Ada, pemeliharaan jalan dan kendaraan, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, pengangkutan sampah, taman dan pusat rekreasi, transportasi relatif lebih mudah diukur.
- Pelayanan seperti misalnya pelayanan sosial, perencanaan cenderung lebih sulit diukur karena hasilnya tidak bisa diduga, sulit diukur dan butuh waktu lama untuk mencapainya.

Contoh: IKK/IKU Bappeda

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

EPPD – PP 6/2008

Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2
Sumatera Utara	6.1	6.7	7.2	7.6	8.1
Sumatera Barat	5.4	6.0	6.4	7.0	7.8
Riau	4.6	4.9	5.1	5.8	6.8
Kepulauan Riau	6.7	7.4	7.0	7.5	7.5
Jambi	6.5	7.0	7.4	8.1	8.9
Sumatera Selatan	5.8	6.1	6.2	6.7	7.5
Kep. Bangka Belitung	5.5	6.1	6.8	7.1	7.5
Bengkulu	5.9	6.7	7.3	7.7	8.4
Lampung	6.2	6.8	7.2	7.7	8.2

Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sumatera Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	16.2	14.9	13.7	12.5	11.3
Sumatera Utara	9.2	8.7	8.1	7.4	6.7
Sumatera Barat	6.7	6.2	5.8	5.3	4.8
Riau	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7
Kepulauan Riau	5.1	4.6	4.3	3.8	3.4
Jambi	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2
Sumatera Selatan	12.2	11.3	10.4	9.5	8.6
Kep. Bangka Belitung	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7
Bengkulu	14.7	13.6	12.5	11.4	10.3
Lampung	14.1	13.6	12.6	11.5	10.5

Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sumatera Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	8.5	8.2	7.9	7.5	7.2
Sumatera Utara	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2
Sumatera Barat	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
Riau	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1
Kepulauan Riau	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1
Jambi	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6
Sumatera Selatan	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7
Kep. Bangka Belitung	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7
Bengkulu	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9
Lampung	4.9	4.7	4.6	4.4	4.3



Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumbar

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi- Payakumbuh 2. Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok 3. Pembangunan jalur KA antara Duku – Bandara Internasional Minangkabau 4. Reaktivasi jalur KA antara Pariaman - Naras 5. Reaktivasi jalur KA antara Muaro Kalaban - Muaro		

PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Padang*		

PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pengembangan Bandara Minangkabau 2. Pengembangan Bandara Rokot		

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan 2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang* 3. Pengembangan Pelabuhan Tiram 4. Pengembangan Pelabuhan Pasapuat		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan P. Sipora 2. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung 3. Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi 4. Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut 5. Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk (Jembatan & Terowongan) 6. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep 7. Pembangunan Jalan Mara - Sioban - Taopejat 8. Pembangunan Jalan Padang - Mukomuku 9. Pembangunan Jalan Padang Panjang – Solok 10. Pembangunan Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan 11. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Bangko 12. Pembangunan Jalan Padang Bypass 		

ASDP

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tua Pejat 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikakap 3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Danau Ombilin* 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pagai Selatan* 5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Padang		

KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. PLTP Muara Laboh (FTP2) 70 MW 2. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam2. Pembangunan DI. Batang Sinamar3. Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan (3273 Ha)4. Pemb. DI Kawasan Batang Bayang5. Pemb. DI Kawasan Bandar Ubo Solok (3.2000 ha)6. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)7. Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-Sungai Tunu)		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
8. Anai River Channel Improvement From River Mouth to Section 50 M Up Stream Bypass Bridge di Kab. Padang Pariaman (0,15 Km) 9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji 10. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis 11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lumbo Pesisir Selatan 12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tandikek		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
13.Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Lurus Kota Padang 14.Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Pasaman 15.Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Kampar 16.Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Sanipan 17.Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Air Dingin 18.Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing Bt. Kuranji-Limau Manis Kota Padang		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
19. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Timbalun Bungus Kota Padang		
20. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Padang Pariaman		
21. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sasak Pasaman Barat		
22. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai luhung-bayang-Api-api-Ketaping-Sago Pesisir Selatan		
23. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sumedang Pesisir Selatan		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
24. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji Pesisir Selatan 25. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Amping Parak Pesisir Selatan 26. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Bungus Padang 27. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Padang di Kota Padang 28. Danau Singkarak Kab. Solok		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
29. Danau Dibawah Kab. Solok 30. Pembangunan Bendung DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok selatan (MYC) Kab. Solok Selatan 31. Pembangunan Jaringan Tersier DI. Lubuk Malako di Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan 32. Pembebasan Tanah DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Kab. Solok Selatan		

PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Pembangunan SMK Kelautan 2. Pembangunan SMA		

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
1. Peningkatan kapasitas BP4 menjadi RS rujukan regional khusus untuk paru		

PERUMAHAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar	RPJMD Kota Sawah Lunto
<ol style="list-style-type: none">1. Proses pembebasanlahan untuk asrama haji embarkasi di Padang Pariaman sudah selesai dilaksanakan2. Bantuan lanjutan pembangunan Masjid Raya (Islamic Center) Padang		



Multilateral Meeting



Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Pembangunan Daerah Tertinggal



1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;
Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda

Bank Indonesia;
Kemen Koperasi

Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria
9 juta Ha

Pengendalian
impor pangan

Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan

Pendirian bank
pertanian &
UMKM

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

**KEDAULATAN
PANGAN**

Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi,
bendungan,
pasar, dan
sarpras
transportasi

Stop konversi
lahan produktif

Gudang dgn
fasilitas
pengolahan
pasca panen
di sentra
produksi;

Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; **Pemda**

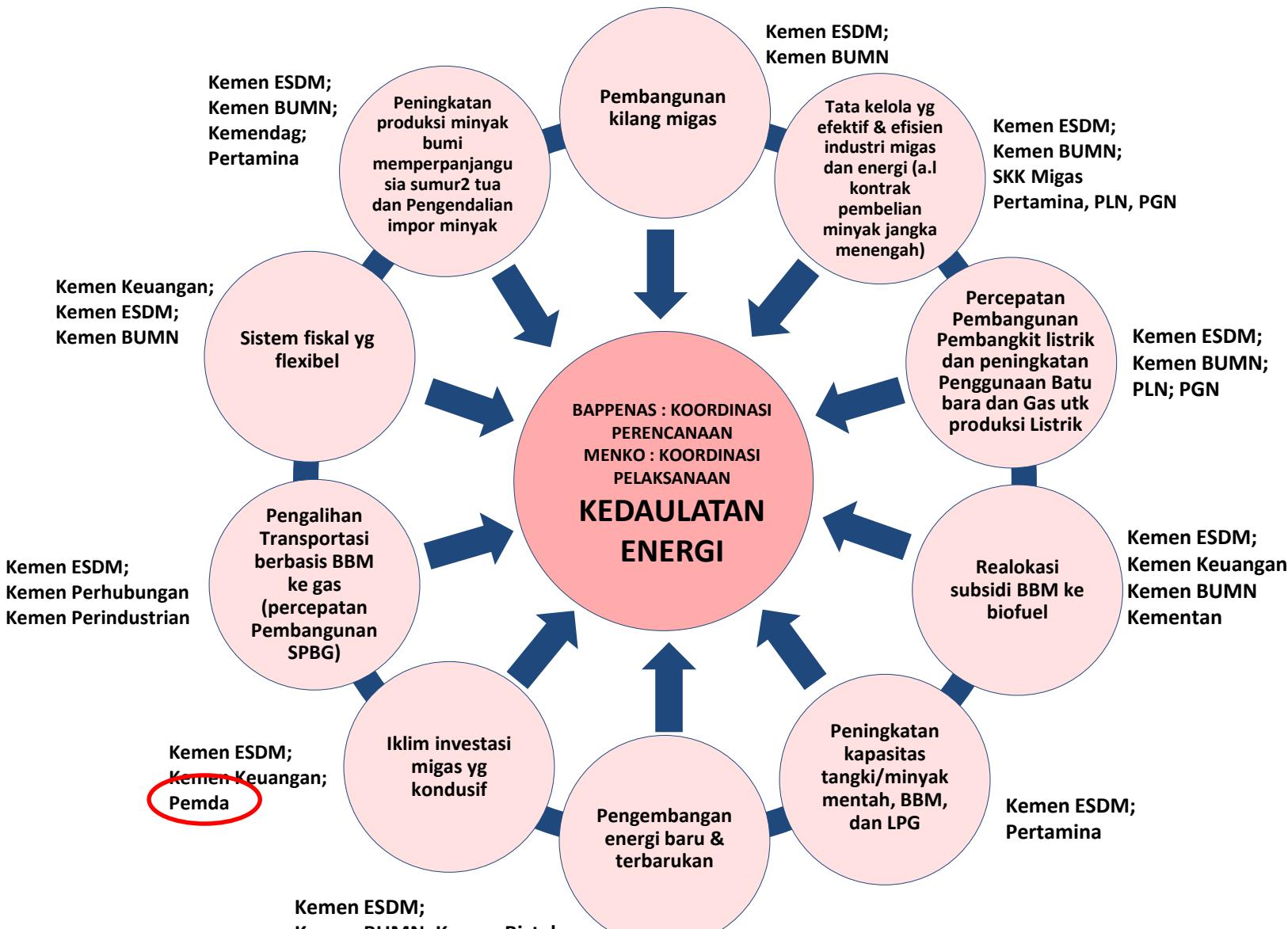
Pemulihian
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
Benih

Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda

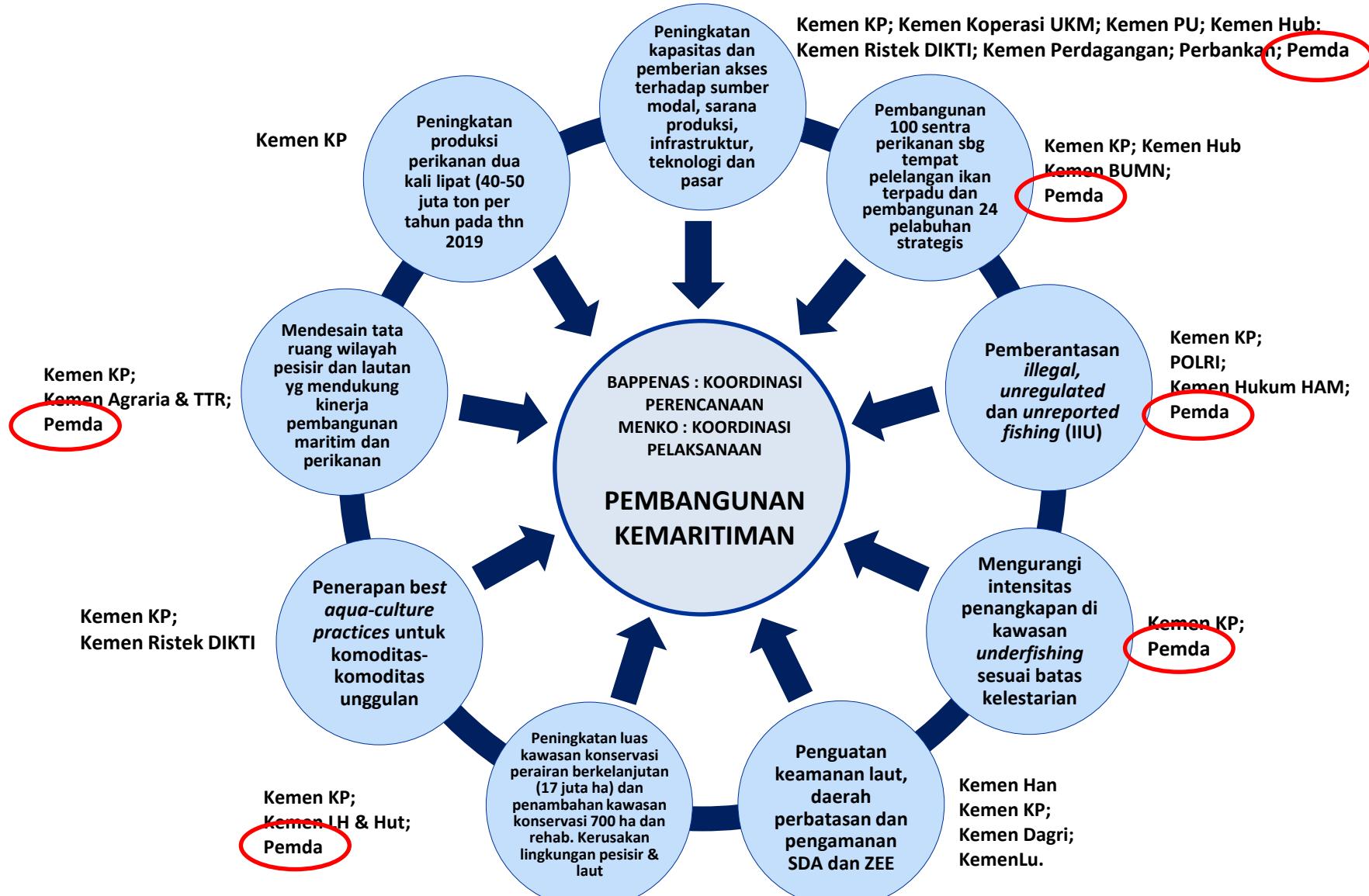
Pemda:
Kemen Agraria & TTR

Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)

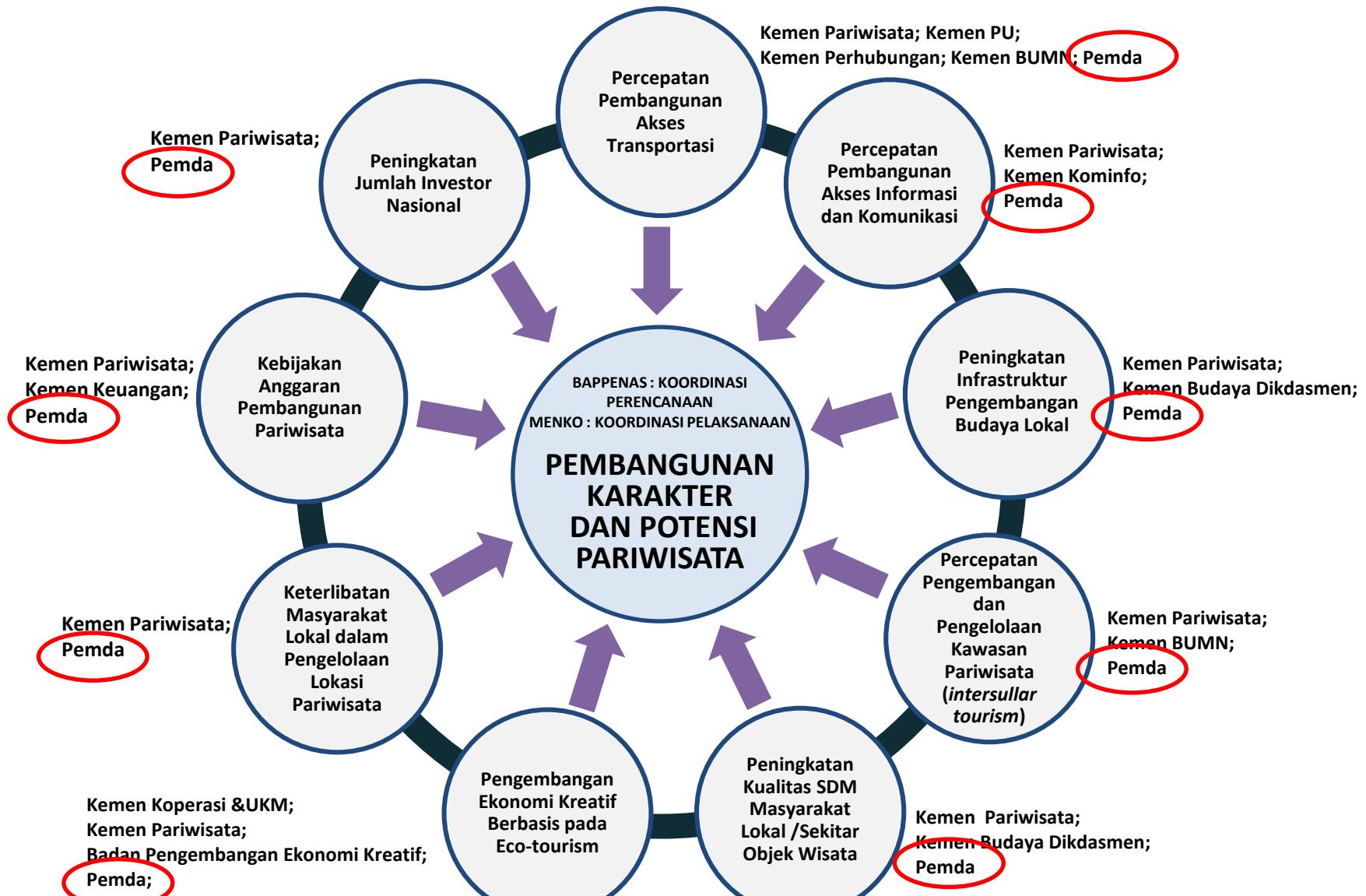
2. Kedaulatan Energi



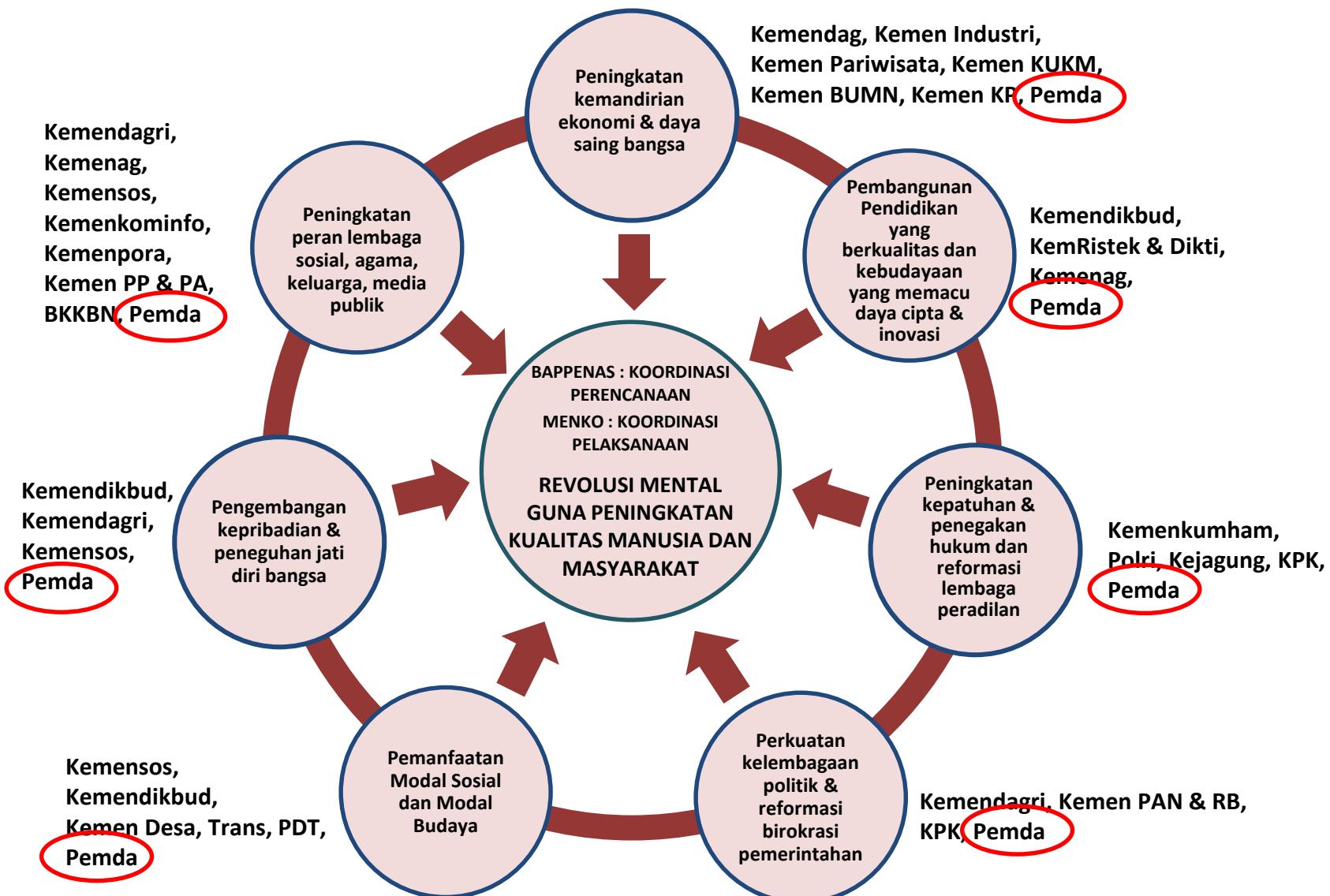
3. Kemaritiman



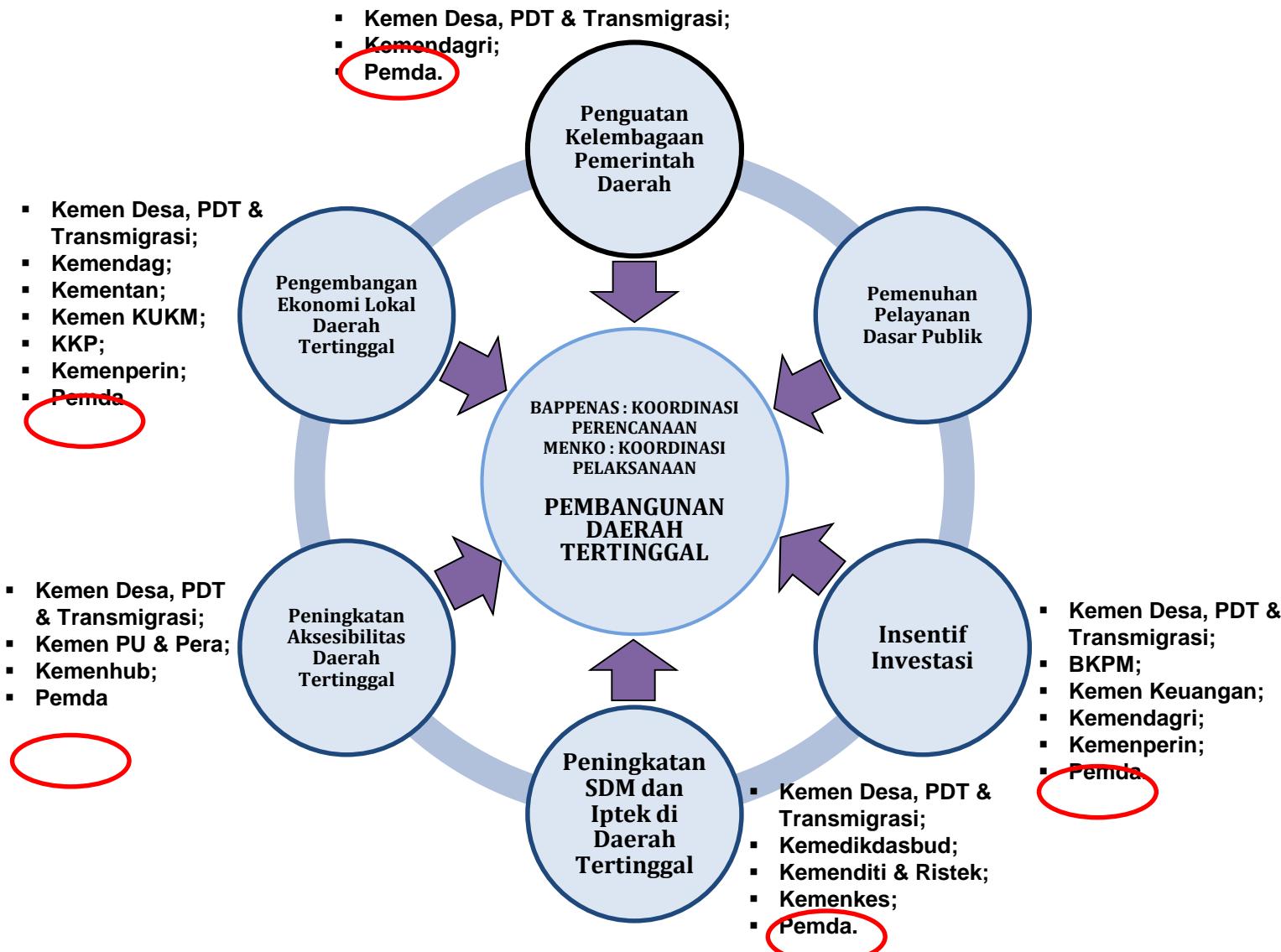
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



7. Pembangunan Daerah Tertinggal



Terima Kasih

